

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pertanian

2.1.1 Pengertian Pertanian

Menurut Mosher dalam (Pane et al., 2018), pertanian adalah suatu bentuk produksi yang khas yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Usaha tani yang dikelola oleh para petani merupakan kegiatan yang tujuan utamanya adalah merangsang pertumbuhan tanaman. Usaha tani ini merupakan salah satu bentuk bisnis yang memiliki pengeluaran serta pendapatan. Menurut Van Aarsten dalam (Pane et al., 2018), pertanian adalah kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangkan tumbuhan dan hewan tersebut.

Menurut Pramudya Arief dalam (Permana, 2020), pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati. Diantara sumber daya hayati yaitu tumbuhan, hewan, bakteri, jamur dan alga. Kegiatan pemanfaatan dapat berupa cocok tanam, pembesaran hewan ternak, budidaya ikan, kultur bakteri dan lain-lain. Pertanian dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, dan mengelola lingkungan hidup. Pertanian berkaitan erat dengan aspek ekonomi. Secara luas, pertanian tidak dipandang sebatas kegiatan produksi,

melainkan mencakup juga kegiatan distribusi dan konsumsi dengan sumber daya hayati sebagai produk (Permana, 2020).

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa pertanian adalah suatu usaha mengelola sumber daya alam, baik hewan maupun tumbuhan untuk diolah menjadi suatu produk yang bernilai jual lebih tinggi. Adapun hasil dari pengolahan sumber daya tersebut diantaranya adalah bahan pangan, bahan industri, serta sumber energi.

2.1.2 Pertanian sebagai bagian dari UMKM

Menurut Dian Marlina dalam (Marlina, 2019), Indonesia merupakan negara yang meningkatkan pembangunan ekonominya dengan bertumpu pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu usaha pemerintah dalam membantu mengembangkan ekonomi melalui sektor UMKM adalah dengan adanya perhatian intensif yang dilakukan pemerintah. UMKM merupakan salah satu sektor unggulan yang berkontribusi dalam perkembangan perekonomian Nasional, UMKM juga diklaim sebagai penggerak utama perekonomian negara.

UMKM memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap PDB nasional, yaitu mencapai angka 60.34 persen pada tahun 2017. Menurut Dian (Marlina, 2019), UMKM mampu menjadi solusi ketimpangan ekonomi karena UMKM telah menyerap tenaga kerja hingga 97,22 persen. Bank Dunia mengelompokkan UMKM berdasarkan standarisasi, adapun tiga kelompok tersebut adalah usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro.

Berdasarkan standarisasi Bank Dunia dalam (Marlina, 2019), Usaha mikro merupakan usaha yang paling sedikit memiliki tenaga kerja yaitu kurang sepuluh

orang dengan total aset tidak lebih dari \$100.000. Kategori yang kedua yaitu usaha kecil yang memiliki tenaga kerja lebih dari sepuluh orang, namun tidak lebih dari lima puluh orang. Total aset yang dimiliki antara \$100.000 hingga \$3.000.000. Adapun kategori yang ketiga adalah usaha menengah yang memiliki tenaga kerja antara lima puluh hingga tiga ratus orang dengan total aset sebesar \$3.000.000 hingga \$15.000.000. Menurut Dian Marlina (Marlina, 2019), UMKM juga bisa dikelompokkan berdasarkan prespektif usaha, yaitu UMKM sektor informal. UMKM mikro, usaha kecil dinamis, dan *fast moving enterprise*.

Menurut Nizam dalam (Rusmanah & Andrianto, 2021), sektor pertanian merupakan salah satu UMKM. Pada tahun 2011, jumlah UMKM yang bergerak di sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan mencapai sekitar 48,85 persen. UMKM sektor pertanian mencakup berbagai macam bentuk usaha yang memanfaatkan benda-benda/barang-barang biologis (hidup). Benda/barang tersebut bersumber dari alam dan bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan/usaha lainnya. Sektor pertanian juga memberikan kontribusi yang tinggi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pada pertengahan tahun 2018, Presiden Joko Widodo menyatakan UMKM di Indonesia menyumbang sekitar 60 persen pertumbuhan ekonomi nasional dengan 49 persen dari UMKM didominasi oleh sektor pertanian.

2.1.3 Dampak Positif Sektor Pertanian

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Lebih dari enam puluh persen rakyat Indonesia menyatakan bahwa pertanian memiliki peran penting dalam

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peningkatan devisa negara menjadi salah satu peran sektor pertanian pada ekonomi.

Secara lebih rinci, ada beberapa dampak positif sektor pertanian, sebagai berikut :

A. Menyerap banyak tenaga kerja

Kontribusi pertanian yang besar terhadap perekonomian nasional berbanding lurus dengan besarnya penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor bisnis yang masih bersifat padat karya (*labor intensive*), bukan padat modal (*capital intensive*). Berdasarkan data BPS (Kusumaningrum, 2019) yang menunjukkan bahwa sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja hingga 43,3 persen pada 2004 dan mengalami peningkatan hingga 44,0 persen pada 2005. Peningkatan ini terus terjadi hingga tahun 2006 sektor pertanian berhasil menyerap tenaga kerja sejumlah 44.5 persen.

B. Merupakan kebutuhan pokok manusia

Pertanian adalah salah satu sektor yang menjanjikan bagi perekonomian Indonesia. Hasil dari sektor pertanian merupakan bahan pokok yang menjadi sumber kehidupan manusia. Kegiatan pertanian tidak hanya berfokus pada pemenuhan kehidupan sendiri bagi para petani, melainkan juga menjadi salah satu upaya pemanfaatan sumber daya alam Indonesia.

2.1.4 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Kusumaningrum (Kusumaningrum, 2019) Indeks berantai Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian atas dasar harga konstan menunjukkan penurunan dan kenaikan setiap tahunnya. Indeks PDB

pada tahun 2015 mengalami penurunan hingga sebesar 0.47 poin dibandingkan tahun 2014. Penurunan ini terus terjadi hingga tahun 2016 yang kembali menurun sebesar 0,51 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut berbanding terbalik dengan presentase kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto yang mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Pemaparan dari Kusumaningrum memberikan gambaran bahwa pertanian sangat berperan dalam perekonomian dan pembangunan daerah. Sektor pertanian diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi jumlah angka pengangguran. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ekonomi petani. Hal ini dilakukan sejalan dengan pernyataan Kusumaningrum yang menyatakan bahwa sektor pertanian mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional.

Adapun beberapa peranan sektor pertanian dalam pembangunan nasional diantaranya adalah meningkatkan penerimaan devisa negara, membuka lapangan pekerjaan baru, menambah daya saing ekonomi, menjaga kestabilan kebutuhan konsumsi dalam negeri termasuk bahan baku industri dalam negeri serta meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB sangat besar terutama pada saat masa krisis yang pernah terjadi pada tahun 1997-1998. Pada masa krisis tersebut, sektor pertanian menjadi satu-satunya penyelamat ekonomi Indonesia karena pertumbuhannya yang selalu menunjukkan angka positif.

2.2 Kelompok Tani

2.2.1 Pengertian Kelompok Tani

Ada beberapa pengertian kelompok tani yang dipaparkan oleh ahli, beberapa diantaranya, menurut Van Aarsten (1953) dalam (Pane et al., 2018) memaparkan bahwa pertanian merupakan kegiatan manusia yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang apda mulanya dicapai dengan jalan sengaja untuk menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakan tumbuhan dan hewan tersebut. Menurut Mosher (1966) dalam (Pane et al., 2018) menjelaskan bahwa pertanian merupakan bentuk produksi yang khas didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dan hewan dalam suatu usaha tani dimana kegiatan produksi merupakan bisnis sehingga pengeluaran dan pendapatan mempunyai arti yang sangat penting.

Adapun Hasibuan dalam (Kasriani, 2018) juga memaparkan arti kelompok yang berfokus pada kelompok tani, sebagai berikut kelompok tani secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dengan pengelolaan secara bersama. Selain itu, kelompok tani juga digunakan sebagai media belajar organisasi dan kerjasama antar petani. Dengan adanya kelompok tani, para petani dapat bersama-sama memecahkan permasalahan yang antara lain berupa pemenuhan sarana produksi pertanian, teknis produksi dan pemasaran hasil. Kelompok tani sebagai wadah organisasi dan bekerjasama antar anggota mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat tani, sebab segala kegiatan dan permasalahan dalam

berusahatani dilaksanakan oleh kelompok secara bersamaan. Melihat potensi tersebut, maka kelompok tani perlu dibina dan diberdayakan lebih lanjut agar dapat berkembang secara optimal.

Sementara Wahyuni (2007:93) dalam (Kasriani, 2018) mengatakan bahwa Kelompok tani adalah kumpulan petani / peternak / pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial-ekonomi-sumber daya), dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompok tani adalah suatu organisasi yang berkembang dari, oleh, dan untuk petani dengan karakteristik saling mengenal dan memiliki pembagian tugas serta kesepakatan bersama. Kelompok tani termasuk organisasi nonformal yang memiliki tujuan mencapai skala ekonomi serta meningkatkan kualitas, kuantitas serta kontinuitas dengan menjadi wadah belajar mengajar dan wahana bekerjasama.

Indonesia memiliki kelompok tani sebanyak 254.822 yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan data dari Menteri Pertanian RI pada tahun 2007 (Kasriani, 2018) kelompok tani di Indonesia tersebar dengan rincian tiga puluh sembilan persen di pulau Jawa, tiga puluh persen di pulau Sumatera, dua belas persen di pulau Sulawesi, dan Sembilan persen di pulau Kalimantan, sedangkan sisanya tersebar di Wilayah lain Indonesia. Soekanto (2002:25) dalam (Kasriani, 2018) mengatakan bahwa kelompok terbentuk karena adanya pertemuan yang berlangsung secara berulang kali yang didasari oleh adanya kepentingan dan pengalaman yang sama.

Secara sederhana, menurut Gayam (Gayam, 2021) Kelompok Tani (POJTAN) adalah kumpulan petani / peternak / pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial,

ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompok tani memiliki fungsi sebagai wahana kerja sama antar sesama petani dalam poktan dan antar poktan maupun dengan pihak lain, sehingga diharapkan usaha tani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan serta lebih menguntungkan.

Berdasarkan pengertian kelompok tani oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa kelompok tani adalah sekumpulan orang yang memiliki profesi sama yaitu sebagai petani, baik petani tumbuhan maupun hewan yang disebut dengan peternak. Kelompok tani menjadi wadah bagi para petani untuk dapat bersama-sama meningkatkan hasil kerja. Kelompok tani memiliki beberapa manfaat dengan tujuan utamanya yaitu meningkatkan kualitas usaha dari masing-masing anggota kelompok.

2.2.2 Ciri-ciri Kelompok Tani

Berdasarkan peraturan menteri pertanian Nomor.67/Permentan/SM.050/12/2016 dalam (Maulana, 2019), kelompok tani memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Saling mengenal, akrab, dan saling percaya diantara sesama anggota;
- b) Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani;
- c) Memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi;
- d) Ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.

Kelompok tani terbagi menjadi empat tingkatan yang didasarkan pada tingkat kemampuan kelompok tani. Keempat tingkatan tersebut dipaparkan oleh Dinas

Pertanian Pangan 2002 dalam (Supu et al., 2020) yang masing-masing tingkatan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kelompok pemula :
 - a. Kontak tani masih belum aktif
 - b. Taraf pembentukan kelompok masih awal
 - c. Pimpinan formal
 - d. Kegiatan kelompok bersifat *informative*
2. Kelompok lanjut :
 - a. Kelompok ini menyelenggarakan kegiatan-kegiatan terbatas.
 - b. Kegiatan kelompok dalam perencanaan
 - c. Pimpinan formal aktif
 - d. Kontak tani mampu memimpin gerakan kerjasama kelompok tani
3. Kelompok Madya
 - a. Kelompok tani menyelenggarakan kegiatan kerjasama usaha
 - b. Pimpinan formal kurang menonjol
 - c. Kontak ini dan kelompok tani bertindak sebagai pimpinan kerjasama usaha tani.
 - d. Berlatih mengembangkan program sendiri
4. Kelompok utama :
 - a. Hubungan melembaga dengan koperasi / KUD
 - b. Perencanaan program tahunan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan.
 - c. Program usaha tani terpadu

- d. Program diusahakan dengan usaha koperasi/KUD Pemupukan modal dan pemilikan atau penggunaan benda modal.

2.2.3 Peran Kelompok Tani

Menurut Usman dalam (Kasriani, 2018) peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan dikembangkan berdasarkan tempat atau posisi seseorang dalam masyarakat. Dalam pengertian ini, peranan merupakan rangkaian peraturan yang menjadi dasar perilaku seseorang dalam bermasyarakat. Peranan berfokus pada fungsi, menyesuaikan diri hingga suatu tahap yang disebut proses.

Kelompok tani memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat tani. Segala kegiatan dan permasalahan dalam berusaha tani dapat didiskusikan dalam kelompok tani. Adanya kelompok tani memberikan peluang bagi para petani untuk memecahkan masalah secara bersama. Adapun beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh para petani diantaranya adalah permasalahan sarana produksi pertanian, teknis produksi, dan pemasaran hasil pertanian. Agar kelompok tani dapat dikembangkan secara optimal maka kelompok tani perlu dibina dan diberdayakan lebih lanjut.

Peraturan Menteri Pertanian dalam (Narang, 2013) menerangkan perananan kelompok tani secara lebih rinci, yaitu sebagai berikut :

- a. **Kelas Belajar**

Kelompok tani merupakan wadah belajar yang memiliki tujuan meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan pendapatan petani serta meraih kehidupan yang lebih baik. Salah satu kegiatan kelompok tani adalah belajar

mengajar dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usahatani yang mandiri. Agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik, Menteri Pertanian dalam (Narang, 2013) memiliki arahan-arahan kelas belajar kelompok tani sebagai berikut:

1. Menggali dan merumuskan kebutuhan belajar
 2. Merencanakan dan mempersiapkan kebutuhan belajar
 3. Menumbuhkan kedisiplinan dan motivasi anggota poktan
 4. Melaksanakan proses pertemuan dan pembelajaran secara kondusif dan tertib
 5. Menjalin kerjasama dengan sumber-sumber informasi yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang berasal dari sesama petani, instansi pembina maupun pihak-pihak lain
 6. Menciptakan iklim/lingkungan belajar yang sesuai
 7. Aktif dalam proses belajar-mengajar, termasuk mendatangkan dan berkonsultasi kepada kelembagaan penyuluhan pertanian, dan sumber-sumber informasi lainnya
 8. Mengemukakan dan memahami keinginan, pendapat maupun masalah yang dihadapi anggota poktan;
 9. Merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam memecahkan masalah maupun untuk melakukan berbagai kegiatan poktan
 10. Merencanakan dan melaksanakan pertemuan-pertemuan berkala baik di dalam poktan, antar poktan atau dengan instansi terkait.
- b. Wahana Kerjasama:

Selain sebagai wahana belajar, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dalam (Narang, 2013) kelompok tani juga menjadi wahana kerjasama yang memperkuat kerjasama antar anggota kelompok tani, antara kelompok tani satu dengan lainnya, maupun antara kelompok tani dengan pihak lain seperti konsumen. Adanya kerjasama kelompok tani ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi usaha tani serta meningkatkan kemampuan para petani untuk lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dalam kegiatan bertani. Sebagai wahana kerjasama, hendaknya poktan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Menciptakan suasana saling kenal, saling percaya dan selalu berkeinginan untuk bekerjasama
2. Menciptakan suasana keterbukaan dalam menyatakan pendapat dan pandangan diantara anggota poktan untuk mencapai tujuan bersama
3. Mengatur dan melaksanakan pembagian tugas/kerja diantara sesama anggota poktan sesuai dengan kesepakatan bersama
4. Mengembangkan kedisiplinan dan rasa tanggungjawab diantara sesama anggota poktan
5. Merencanakan dan melaksanakan musyawarah agar tercapai kesepakatan yang bermanfaat bagi anggota poktan
6. Melaksanakan kerjasama penyediaan sarana dan jasa pertanian
7. Melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan
8. Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam poktan maupun pihak lain

9. Menjalinkan kerjasama dan kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau permodalan
10. Mengadakan pemupukan modal untuk keperluan pengembangan usaha anggota poktan.

c. Unit Produksi

Pengertian unit produksi dalam hal ini adalah kesatuan usaha yang didasarkan pada masing-masing usaha tani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota poktan. Kesatuan usaha tani ini dapat dikembangkan hingga mencapai skala ekonomis usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas maupun kontinuitas. Sebagai unit produksi, Menteri Pertanian dalam (Narang, 2013) memaparkan hendaknya poktan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi dan sumberdaya alam lainnya;
2. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan bersama, serta rencana kebutuhan poktan atas dasar pertimbangan efisiensi;
3. Memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) usahatani oleh para anggota poktan sesuai dengan rencana kegiatan poktan;
4. Menjalinkan kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan usahatani;
5. Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam poktan, maupun kesepakatan dengan pihak lain;

6. Mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan poktan, sebagai bahan rencana kegiatan yang akan datang;
7. Meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan;
8. Mengelola administrasi secara baik dan benar.

2.3 Persamaan dan Siklus Akuntansi

2.3.1 Persamaan Akuntansi

Persamaan dasar akuntansi merupakan hubungan antara aset dengan hak pemilik, baik pemilik kreditur maupun pemilik usaha. Hak kepemilikan yang dimiliki kreditur disebut dengan utang sedangkan hak yang dimiliki pemilik usaha disebut dengan ekuitas. Menurut Warren dalam (Ulfah, 2020) hubungan antara keduanya membentuk persamaan sebagai berikut.



Sumber : Ami Heppy S (2022)

Gambar 2. 1
Persamaan Dasar Akuntansi

Pada umumnya persamaan dasar harus mencantumkan kewajiban atau liabilitas sebelum ekuitas. Hal tersebut berkaitan dengan apabila terjadi kebangkrutan, maka kewajiban pelunasan terhadap kreditur atau pihak luar lebih

utama untuk dilunasi daripada pemilik entitas. Dengan kata lain, kewajiban dianggap lebih lancar dibandingkan ekuitas.

Persamaan dasar akuntansi berlaku untuk semua aktivitas transaksi bisnis. Aset atau aktiva akan selalu sama dengan kewajiban yang ditambahkan dengan ekuitas pemilik. Jika terjadi peningkatan atau penurunan pada aset, maka kewajiban dan ekuitas juga mengalami hal yang serupa hal tersebut terjadi karena adanya keseimbangan diantara kedua perbandingan tersebut.

2.3.2 Pengertian Siklus Akuntansi

Menurut (Siregar, 2019) dalam (Sitanggang, 2021) siklus akuntansi merupakan gambaran yang menunjukkan prosedur pelaporan keuangan yang dilakukan dan dihasilkan. Adapun menurut (Wadiyo, 2020) dalam (Sitanggang, 2021) siklus akuntansi adalah proses yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis serta berakhir dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi selanjutnya melalui pembuatan jurnal tertutup. Menurut pendapat Dina Fitria (2014:28) dalam (Atmowasito, 2019), yang dimaksud dengan siklus akuntansi adalah sebuah tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, pengelompokan, peringkasan data keuangan yang sudah diproses sebelumnya dan pelaporan yang dimulai saat terjadinya transaksi dalam sebuah entitas.

Menurut Herry (2012:72) dalam (Suyanti, 2017) menyimpulkan bahwa “Proses akuntansi yang diawali dengan menganalisis dan menjurnal transaksi, dan yang diakhiri dengan membuat laporan dinamakan sebagai siklus akuntansi (accounting cycle).” Sementara itu, Rahman Pura (2013:18) dalam (Atmowasito, 2019) menjelaskan bahwa siklus akuntansi adalah rangkaian kegiatan dan tahapan

akuntansi. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan secara sistematis mulai dari pencatatan akuntansi hingga penutupan pembukuan.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa siklus akuntansi merupakan rangkaian atau proses dengan tujuan menghasilkan laporan keuangan. Rangkaian atau proses ini diawali dengan analisa pada transaksi-transaksi keuangan yang kemudian dioleh dengan melakukan pencatatan, penggolongan, pengikhtisarian, dan akhirnya menghasilkan laporan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari siklus akuntansi meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, neraca atau laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan.

2.3.3 Tahapan Siklus Akuntansi

Tahapan dalam siklus akuntansi diawali dari identifikasi yang diperoleh dari bukti transaksi. Bukti yang digunakan sebagai dasar identifikasi dapat berupa nota, kwitansi, faktur, dan dokumen lainnya yang sah. Transaksi-transaksi ini akan mempengaruhi posisi keuangan suatu perusahaan.

Tahapan kedua dalam siklus akuntansi adalah pembuatan jurnal umum yang dibuat dengan dasar analisa transaksi pada tahapan sebelumnya. Pembuatan jurnal umum harus memperhatikan hal-hal dasar akuntansi seperti saldo normal, kode akun, tanggal transaksi, dan prakiraan atas transaksi. Tahapan selanjutnya adalah pembuatan buku besar. Setelah jurnal umum sudah dibuat, maka transaksi yang ada di jurnal umum harus dikelompokkan atau digolongkan sesuai dengan kode akun.

Tahapan keempat adalah pembuatan neraca saldo, setelah akun telah dikelompokkan ke dalam buku besar, akun-akun tersebut dimasukkan kedalam

neraca saldo. Neraca saldo yang menunjukkan jumlah debit dan kredit yang sama disebut *balance* dan sering kali menjadi tolak ukur dari keakuratan perhitungan. Tahapan selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang menggambarkan adanya transaksi yang harus disesuaikan karena sudah digunakan pada periode berjalan. Misalnya penyesuaian karena adanya penyusutan suatu peralatan yang terjadi pada periode berjalan.

Tahapan terakhir sebelum pembuatan laporan keuangan adalah pembuatan jurnal penutup. Dalam akuntansi terdapat dua jenis akun yaitu akun rill dan akun nominal. Menurut Jasup (2011:70) dalam (Wibawanto, 2018) akun rill merupakan rekening-rekening yang pada akhir periode akan dilaporkan dalam neraca. Adapun akun nominal merupakan akun-akun yang pada akhir periode akan di laporkan dalam laporan laba rugi saja sehingga harus ditutup ke akun ekuitas agar dapat masuk ke laporan posisi keuangan atau neraca.



Sumber : Rilo Pambudi (2022)

Gambar 2. 2
Alur Siklus Akuntansi

2.4 KODE AKUN

2.4.1 Pengertian Kode Akun

Menurut Mika dalam (Siregar, 2018) daftar kode akun atau yang sering dikenal dengan daftar akun atau daftar perkiraan merupakan daftar yang sudah dibuat dalam struktur tertentu yang terdiri dari rangkaian kode dan nama akun guna membantu pencatatan akuntansi suatu entitas. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 dalam (Siregar, 2018) bagan akun standar merupakan daftar akun buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaporan anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan. Dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kode akun merupakan tanda yang memberikan perbedaan antara satu akun dengan akun lainnya yang berfungsi memudahkan penyusunan laporan keuangan.

Daftar akun memiliki tingkat fleksibilitas sehingga tidak menuntut suatu entitas memiliki kode akun yang sama dengan entitas yang lain. Daftar akun yang berlaku pada suatu entitas dapat disesuaikan dengan kebutuhan entitas terkait. Sehingga memungkinkan adanya perbedaan kode akun untuk satu akun yang sama, misalnya pada perusahaan A kode akun 114 merupakan kode akun untuk asset tetap namun pada perusahaan B asset tetap memiliki kode akun 115.

Kode akun dapat digunakan sebagai pedoman dalam pencatatan dan pengklasifikasian transaksi keuangan. Fungsi lain dari kode akun ini dapat memberikan kemudahan dalam melakukan perbaikan terkait catatan transaksi yang mengalami perubahan akibat kesalahan penggunaan atau jika ada transaksi

tambahan. Kode akun yang sudah dibuat tidak boleh memiliki kesamaan dengan akun lain karena masing-masing kode akun akan mewakili satu akun.

2.4.2 Macam-macam Kode Akun

Berdasarkan buku pengantar akuntansi (Wulandari & Sahid, 2013) Kode akun memiliki berbagai cara penyusunan, yang terdiri dari kode akun numeral, angka blok, angka desimal, dan kelompok.

A. Kode Akun Numeral

Kode akun numeral merupakan kode akun yang terdiri dari nomor-nomor pada akun secara berurutan. Kode ini mudah diterapkan namun memiliki kesulitan dalam penambahan apabila suatu saat ada akun baru. Misalnya ada pembelian asset tetap baru yang belum memiliki nomor akun sehingga mengharuskan perusahaan membuat akun baru.

B. Kode Angka Balok

Kode angka balok dibuat dengan cara mengelompokkan akun menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok memiliki blok angka yang berurutan. Misalnya kode 1000-1500 untuk asset, 2000-2999 untuk kewajiban. Pemberian kode angka balok ini memberikan kemudahan penambahan akun apabila suatu saat perusahaan menambah akun baru.

C. Kode Angka Desimal

Kode angka desimal memberikan kode angka terhadap akun dengan membaginya menjadi beberapa kelompok. Kelompok tersebut memiliki jumlah maksimal yaitu 10 sub-kelompok dan sub-kelompok memiliki batasan 10 golongan.

Misalnya akun 1 untuk persediaan, akun 1.1 untuk persediaan bahan baku, akun 1.2 untuk akun persediaan bahan pembantu.

D. Kode Akun Kelompok

Kode akun kelompok dibuat dengan dua atau lebih sub kode akun yang dikombinasi menjadi satu akun. Jumlah angka dalam kode harus tetap. Misalnya kode akun 11 harta maka sub akunnya 111 kas.

2.4.3 Struktur Penyusunan Daftar Kode Akun

Menurut Sasongko dalam (Siregar, 2018) kode awal untuk akun-akun di buku besar pada umumnya adalah sebagai berikut :

- a. Kode awal akun asset : 1
- b. Kode awal akun kewajiban : 2
- c. Kode awal akun modal : 3
- d. Kode awal akun pendapatan : 4
- e. Kode awal akun beban : 5
- f. Kode awal pendapatan lain-lain : 6
- g. Kode awal beban lain-lain : 7

Struktur penggolongan kode akun disesuaikan dengan kebutuhan dari entitas terkait. Struktur WXYZ, dengan keterangan W merupakan kelompok akun, X merupakan golongan akun, Y merupakan nama akun, dan Z merupakan sub akun.

2.5 SAK EMKM

2.5.1 Pengertian SAK EMKM

Pada tanggal 24 Oktober 2016 telah disusun dan disahkan *exposure draft* Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

oleh DSAK IAI. Penyusunan dan pembuatan SAK EMKM didasarkan pada UU No.20 tahun 2008 tentang UMKM. SAK EMKM ini bersifat lebih sederhana daripada SAK ETAP.

Tujuan dari diterbitkannya SAK EMKM ini adalah membantu UMKM agar dapat menerapkan akuntansi sesuai standar yang jika menggunakan SAK ETAP masih dianggap rumit. Menurut Kusuma dan Lutfiany dalam (Kusuma & Lutfiany, 2019) Penggunaan SAK EMKM ini ditujukan untuk pengguna eksternal entitas mikro, kecil dan menengah. Pengguna eksternal yang dimaksud seperti pemilik yang tidak terjun langsung dalam pengelolaan usaha dan kreditur, dimana penggunaan laporan keuangan pada UMKM cenderung tidak membutuhkan laporan keuangan rumit dan analisis laporan keuangan secara mendalam.

Dasar pengukuran yang digunakan dalam SAK EMKM adalah pengukuran menggunakan biaya historis sehingga SAK EMKM memuat pengaturan akuntansi yang lebih sederhana dari SAK ETAP. SAK EMKM juga membahas hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan SAK EMKM, diantaranya adalah Dasar Kesimpulan (DK) yang berisikan penjelasan atas latar belakang pengaturan akuntansi yang ditetapkan oleh SAK EMKM. Selain itu untuk memberikan kemudahan dalam penerapan SAK EMKM, dalam SAK EMKM juga terdapat contoh-contoh ilustratif penerapan SAK EMKM. (RI, 2018).

2.5.2 Penyajian Laporan Keuangan

Berdasarkan SAK EMKM (RI, 2018), Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan asset, liabilitas, penghasilan, dan beban.

Pengungkapan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK EMKM tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain atas posisi dan kinerja keuangan entitas. Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan:

- a. Relevan, yaitu informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan.
- b. Representasi tepat, yaitu informasi dalam laporan keuangan merepresentasikan secara tepat apa yang akan direpresentasikan dan bebas dari kesalahan material dan bias.
- c. Keterbandingan, yaitu informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar entitas juga dapat dibandingkan antar entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan.
- d. Keterpahaman, yaitu informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.

2.5.3 Jenis Laporan Keuangan

Berdasarkan SAK EMKM (RI, 2018) mensyaratkan pelaporan keuangan minimum terdiri dari, laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi

selama periode, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan.

a. Laporan Posisi Keuangan

Dalam laporan posisi keuangan suatu entitas ada beberapa pos yang terdiri dari aktiva, utang, dan juga ekuitas. Beberapa pos yang termasuk aktiva dalam laporan keuangan adalah kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap. Adapun pos yang merupakan utang terdiri dari utang usaha dan utang bank. Laporan posisi keuangan juga bisa menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang secara terpisah.

b. Laporan Laba Rugi

Pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak merupakan contoh beberapa pos yang ada di laporan laba rugi. Secara garis besar, laporan laba rugi memuat seluruh penghasilan dan beban yang ada dalam satu periode berjalan, kecuali jika ada ketentuan lain. SAK EMKM mengatur perlakuan atas dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan.

c. Catatan atas Laporan Keuangan

CaLK berisikan beberapa hal seperti pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, memuat ketentuan atau kebijakan akuntansi yang digunakan entitas terkait, serta memuat informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material. Tujuan dari pembuatan CaLK adalah memudahkan para pengguna laporan keuangan dalam

memahami laporan keuangan. CaLK disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam CaLK.

